

MEWUJUDKAN GENERASI SADAR PAJAK MELALUI PENDIDIKAN INKLUSI KESADARAN PAJAK (STUDI KASUS PADA UNIVERSITAS SELAMAT SRI)

Arina Hidayati¹, Tri Joko Sulistiyanto², Farah Dzil Barr³

Universitas Selamat Sri^{1,2,3}

Article Info

Article History:

Received Date:

28 Desember 2021

Revised Date :

17 Januari 2022

Accepted Date:

25 Februari 2022

ABSTRACT

Abstract. Tax Consciousness Inclusive Education is a program created by Ministry of Finance and Ministry of Research, Technology, and High Education (Indonesian: Kemenristek Dikti). Universitas Selamat Sri (UNISS) is one of universities, with 60% working students. However, the authors' preliminary observation showed only 10% of students having had Tax Identity Number (TIN or Indonesian: NPWP), and less than 10% of them having met taxpayers' obligation. The fact made the author interested in finding out "how is the tax consciousness inclusive education applied to UNISS?" This research was conducted using qualitative method with case study design. Meanwhile, data collection was done using three techniques: interview, observation, and documentation study. Technique of analyzing data used was Spradley's domain analysis, in which the data obtained would be processed through triangulation validity test technique. The tax consciousness inclusive education in UNISS is implemented through internalizing it into the learning of General Compulsory Course and taxing course, and technical guide for lecturers and establishment tax volunteer group for lecturers and students.

Abstrak: Pendidikan Inklusi Kesadaran Pajak menjadi salah satu program Kementerian Keuangan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). Universitas Selamat Sri (UNISS) merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki jumlah 60% mahasiswa pekerja. Namun selama observasi awal peneliti, hanya 10% mahasiswa yang sudah memiliki NPWP, dan kurang dari 10% yang sudah memenuhi kewajiban Wajib Pajak. Fakta tersebut menyebabkan peneliti tertarik untuk mengetahui "bagaimana pendidikan inklusi kesadaran pajak yang diterapkan pada UNISS?". Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis domain menurut Spradley. Dimana data yang diperoleh akan diolah melalui teknik uji keabsahan triangulasi. Bentuk pendidikan inklusi kesadaran pajak di UNISS berupa internalisasi pada Mata Kuliah Wajib Umum dan pembelajaran pada mata kuliah perpajakan, serta bimbingan teknik untuk dosen dan pembentukan relawan pajak bagi dosen serta mahasiswa.

Keyword :

*Tax Consciousness
Inclusive Education,
University,
Tax-Conscious
Generation*

PENDAHULUAN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam hal menumbuhkan nilai-nilai kesadaran dan pengetahuan perpajakan (Kemenkeu, 2018). Kemenkeu memperkirakan penerimaan pajak untuk keseluruhan tahun 2019 tidak dapat mencapai target. Direktur Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyampaikan bahwa kekurangan penerimaan pajak hingga akhir tahun diperkirakan sampai pada angka Rp 140 triliun (Liputan 6, 2019). Beliau Robert Pakpahan (Direktur Jenderal Pajak, 2019) menjelaskan, untuk penerimaan pajak hingga akhir tahun hanya akan mencapai 91 persen dari target dengan pertumbuhan hanya sebesar 9,5 persen dari tahun lalu. Padahal, pertumbuhan penerimaan pajak tahun lalu bisa mencapai 14,3 persen meski hanya 92 persen dari target (Liputan 6, 2019).

Berdasarkan data di atas, dapat ditarik simpulan bahwa penerimaan pajak tahun ini justru mengalami kemunduran sebesar 4,8%, dengan selisih angka kekurangan angka pajak diperkirakan 140 Triliun. Menurut (Lovihan, 2014) fakta yang terjadi, masyarakat tidak menyukai membayar pajak. Ketidak tertarik tersebut disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui wujud konkret dari uang imbalan yang dikeluarkan dalam pembayaran pajak (Nurlis, 2010). Terlebih lagi masyarakat saat ini membayar pajak menggunakan *self assessment system* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang, menyetor sendiri dan melaporkan SPT sendiri. Dengan demikian masalah kepatuhan Wajib Pajak menjadi persoalan yang paling penting di Indonesia. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak yang tidak mematuhi kesadaran mereka, cenderung

akan menunda, menghindari bahkan mengelak kewajiban mereka.

Kurniawan (2020) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang mengenai pajak maka kepatuhan membayar pajak akan semakin besar. Studi yang dilakukan pada salah satu perguruan tinggi di Malaysia menyebutkan bahwa ada kenaikan angka pemenuhan biaya pajak setelah mendapat pendidikan formal dinilai menjadi salah satu wadah yang cukup efektif dalam menumbuhkan karakter tertentu. Hal ini tercantum dalam Undang-undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan UU di atas, dapat diartikan bahwa pendidikan dapat menciptakan kesadaran manusia untuk bersikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban mereka membayar pajak. Pendidikan yang melahirkan pengetahuan perpajakan menurut (Jayate, 2017) dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

(Pajak Direktorat Jenderal, 2016) menjalin kerjasama dengan pihak-pihak (masyarakat, perguruan tinggi dan pemerintah daerah) untuk mengadakan pendidikan inklusi kesadaran pajak. Perguruan tinggi menjadi salah satu sasaran utama dalam pendidikan inklusi kesadaran pajak pada tahun 2019. Pasalnya, pada tahun 2019 DJP memprogramkan implementasi pendidikan inklusi kesadaran pajak pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Surat Edaxzran dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 484/B/SE/2017 yang menghimbau kepada seluruh perguruan tinggi agar mulai menerapkan pendidikan inklusi kesadaran pajak.

Pendidikan ini dilakukan melalui *Hidden Curriculum* yang terintegrasi dan terinternalisasi dalam mata kuliah peminatan dan mata kuliah pilihan sebagai konten maupun konteks pokok bahasan atau disampaikan melalui kegiatan ekstra kurikuler dalam kuliah umum, pembekalan KKN, latihan kepemimpinan, kewirausahaan dan lain – lain.

Universitas Selamat Sri (UNISS) merupakan salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah yang memiliki jumlah mahasiswa kurang lebih seribu. UNISS mendirikan dua kampus yang terletak di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Wakil Rektor III Universitas Selamat Sri menyatakan bahwa 60 % mahasiswa sudah bekerja. Artinya, 60% mahasiswa di UNISS sudah berpenghasilan sendiri. Namun dari 60% mahasiswa tersebut, ditemukan fakta sebanyak 10% yang sudah memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak. Fakta tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa UNISS yang sudah berpenghasilan sendiri ini menjadi potensi yang cukup besar untuk memberikan edukasi kesadaran pajak. Pendidikan inklusi kesadaran pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk mendaftarkan, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan SPT secara mandiri.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian ini terdiri dari dua hal, yakni : (1) mengetahui program pendidikan inklusi kesadaran pajak di Universitas Selamat Sri (UNISS), dan (2) mengetahui bentuk kerjasama pihak pemerintah daerah, perguruan tinggi dan Kantor Pelayanan Pajak dalam implementasi program pendidikan inklusi pajak. Metode yang digunakan selama proses pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan kajian dokumentasi. Proses wawancara dilakukan peneliti dengan melibatkan pihak Wakil Rektor 1, dan 3

UNISS. Sedangkan untuk pihak KPP Pratama Pajak, peneliti melakukan proses wawancara secara daring dengan (1) fasilitator pendidikan inklusi KPP Batang bagian Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dan (2) staf di bagian seksi bimbingan penyuluhan dan pengeolaan dokumen, bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat di Kanwil Jawa Tengah. Observasi dilakukan melalui pengamatan tak langsung pada salah satu kegiatan pendidikan inklusi pajak yang diselenggarakan di UNISS Kampus 2 Batang. Pada kegiatan observasi ini peneliti mengamati sejauh apa pendidikan inklusi pajak yang diselenggarakan UNISS dan KPP Pratama Batang.

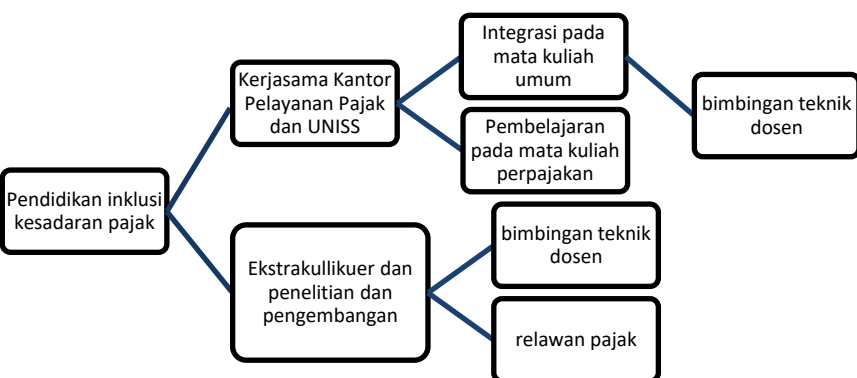
Analisis data yang digunakan peneliti adalah menggunakan analisis domain Spradley. Sesuai dengan langkah kerja analisis domain menurut Spradley, peneliti mengklasifikasikan penelitian ke dalam domain utama yang dimasukkan pada setiap rumusan masalah. Adapun masing-masing rumusan masalah akan diklasifikasikan ke dalam domain-domain. Teknik penentuan informan yang dilakukan peneliti adalah menggunakan *purposive sampling*. Dengan demikian pada penelitian ini, peneliti memilih narasumber berdasarkan kepentingan data. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data berupa triangulasi sumber, data dan waktu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk program pendidikan inklusi kesadaran pajak pada Universitas Selamat Sri

Program pendidikan inklusi kesadaran pajak di Universitas Selamat Sri dimulai dengan penyelenggaraan perjanjian kerjasama kedua belah pihak. Perjanjian dilaksanakan pada bulan November 2019, pihak Universitas diwakilkan Rektor sedangkan pihak Direktorat Jenderal Pajak diwakilkan oleh KPP Pajak Kanwil Jawa Tengah. Bentuk pembekalan terkait pendidikan inklusi kesadaran pajak

diberikan pada seluruh Perguruan Tinggi Swasta yang mengikuti pelatihan. Pendidikan tersebut mengarah pada kurikulum. Kurikulum yang dibuat disesuaikan dengan visi dan misi pendidikan inklusi kesadaran pajak. Hingga saat ini UNISS baru menerapkan beberapa bentuk edukasi perpajakan yang sesuai dengan visi misi pendidikan pajak yakni : mewujudkan generasi bangsa yang berkarakter cinta tanah air dan bela negara (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2017). Namun demikian, UNISS belum menyusun kurikulum pendidikan inklusi kesadaran pajak yang disahkan. Adapun bentuk kegiatan pendidikan inklusi kesadaran pajak di UNISS tergambar dalam



bahwa program pendidikan inklusi baru ditempuh pada program seminar yang dilaksanakan setiap tahun pendidikan. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran pajak bagi mahasiswa. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan pihak KPP Pajak Pratama Batang sebagai narasumber utama. Adapun bentuk materi yang diberikan adalah penguatan pengetahuan perpajakan dan manfaat pajak untuk masyarakat. Program seminar pendidikan inklusi pajak menurut

Hal ini tidak sesuai dengan panduan pendidikan inklusi pajak yang dibuat (Direktorat Jendera Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2017). Hal ini dikarenakan pihak rektorat baru proses menyusun rencana kurikulum terbaru untuk mata

Kuliah Wajib Umum yang disesuaikan dengan pendidikan inklusi kesadaran pajak.

Adapun rencana kurikulum MKWU tersebut hendaknya akan menyertakan polarisasi dan visi misi sadar pajak. Namun UNISS sampai saat ini sudah memiliki kurikulum MKWU untuk mata kuliah PKN dan Budi Pekerti yang disesuaikan dengan kerangka konseptual pembelajaran pajak. Rencana Pembelajaran yang peneliti temukan dari dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, mencakup beberapa materi berikut:

- a. Pendidikan pancasila
- b. Asal-usul nenek moyang bangsa
- c. Bukti-bukti peradaban bangsa
- d. Sejarah Indonesia
- e. Pancasila sebagai pandangan hidup
- f. Pancasila sebagai dasar negara
- g. Nilai, norma dan moral yang berlaku di masyarakat

Bentuk pembelajaran di MKWU tersebut dalam penelitian (Hastuti, 2014) dapat disebut sebagai pendidikan inklusi kesadaran pajak.

Strategi penyelenggaraan pembelajaran pada proses pendidikan inklusi kesadaran pajak diselenggarakan melalui internalisasi mata kuliah perpajakan pada beberapa program studi. Wakil Rektor 3 UNISS menyebutkan ada tiga Fakultas yang menyelenggarakan mata kuliah perpajakan, yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL), Ilmu Hukum (FIH) dan Ekonomika dan Bisnis (FEB). Pada tiga Fakultas ini dalam proses pembelajaran pun sudah banyak menyisipkan karakter nasionalisme yang dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk membayar pajak. Meskipun dalam praktiknya, proses pembelajaran di tiga Fakultas ini baru mengarah pada mencetak mahasiswa yang mengetahui pengetahuan pajak. Dengan demikian, meskipun UNISS belum menyelenggarakan kurikulum secara utuh, namun harapannya dapat mencetak mahasiswa yang patuh pajak. Hal ini

mengacu pendapat (Jayate, 2017) bahwa pendidikan yang mampu melahirkan pengetahuan wajib pajak, dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak peserta didik.

Mengacu pada strategi pembelajaran yang peneliti ambil dari beberapa hasil penelitian dan buku panduan pendidikan inklusi kesadaran pajak (terangkum dalam tabel analisis domain), UNISS baru menyelenggarakan poin-poin berikut :

a. Integrasi materi kesadaran pajak pada MKWU

Uniss menerapkan pola-pola pendidikan karakter yang mewujudkan nasionalisme mahasiswa dalam MKWU seperti Pendidikan Kewarganegaraan dan Budi Pekerti.

b. Capaian pembelajaran mata kuliah MKWU pada aspek sikap

Capaian pembelajaran pada MKWU yang terdiri dari Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Budi Pekerti dan Kewirausahaan mengarah pada aspek sikap.

c. Pembelajaran dalam satu bab mengenai kesadaran pajak

Pada FISIPOL, FIIH dan FEB yang menerapkan satu mata kuliah perpajakan dalam kurikulum yang dibuat, sudah mengarah pada capaian pembelajaran pajak

d. Memberikan bahan diskusi, penugasan dan latihan soal terkait dengan pendidikan inklusi kesadaran pajak

Pemberian bahan diskusi, penugasan dan latihan soal yang dikaitkan dengan pendidikan inklusi kesadaran pajak di UNISS hanya diberlakukan untuk mata kuliah perpajakan

e. Penyediaan bahan ajar yang disesuaikan dengan topik pendidikan pajak

Bahan ajar yang disediakan merupakan fasilitas dari Kantor Pelayanan Pajak diberikan untuk Uniss dalam jumlah terbatas.

Strategi lain yang disebutkan menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2016) yakni penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler di kalangan mahasiswa.

Bentuk penyelenggaraan ekstrakurikuler mahasiswa yang dapat meningkatkan karakter kesadaran membayar pajak diwujudkan melalui relawan pajak. Namun di Universitas Selamat Sri sendiri belum menyediakan fasilitas tersebut. Meskipun demikian, pada awal tahun 2021 ini UNISS sudah membentuk kerjasama dengan pihak KPP Pratama Batang untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan tersebut. Selain membentuk relawan pajak, strategi di luar pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan kemampuan dosen agar tertarik melakukan penelitian dan pengembangan di bidang perpajakan dan pendidikan pajak. Upaya ini dilakukan dengan mengikutsertakan dosen pada proses bimbingan teknik pendidikan inklusi kesadaran pajak. Pada bimbingan teknik tersebut, dosen diberikan gambaran bahwa pajak dapat mempengaruhi pembangunan negara. Pembangunan negara ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Peran Kantor Pelayanan Pajak Kantor Wilayah (KPP Kanwil) Jawa Tengah selain memberikan fasilitas dalam bahan ajar dan kerjasama, KPP juga menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknik dosen. Upaya bimbingan teknik ini dilaksanakan guna memberikan bekal kepada dosen dan staf pengajar dalam hal pembuatan rencana pembelajaran, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran. Proses bimbingan teknik baru dilaksanakan satu kali setelah terbentuk kerjasama antara pihak Universitas dan KPP Pajak Kanwil Jawa Tengah.

KESIMPULAN

Simpulan

Pendidikan inklusi kesadaran pajak di Universitas Selamat Sri belum terealisasi dalam sebuah kurikulum yang legal. Bentuk pendidikan inklusi baru mengarah pada internalisasi pendidikan karakter pada MKWU. Adapun aspek pendidikan karakter yang diambil berupa kecintaan terhadap negara, hak dan kewajiban sebagai warga negara dan manfaat pajak itu sendiri bagi

masyarakat dan negara. Selain itu pendidikan inklusi kesadaran pajak diwujudkan melalui pengadaan mata kuliah perpajakan khusus untuk fakultas yang memiliki rumpun ilmu sosial. Seperti di Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada Universitas Selamat Sri. Pendidikan non formal juga menjadi salah satu poin penting dalam mewujudkan generasi sadar pajak. Pasalnya, melalui kegiatan – kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan peningkatan nasionalisme dan jiwa sosial, dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap kewajiban membayar pajak.

Saran

Pola pendidikan inklusi demikian juga hendaknya didukung penuh dengan kompetensi yang unggul dari dosen-dosen. Perlu adanya bimbingan teknik khusus untuk dosen agar dapat menyusun kurikulum pendidikan inklusi kesadaran pajak sesuai visi misi ditjen pajak. Strategi pendidikan inklusi kesadaran pajak yang dilaksanakan di Universitas Selamat Sri masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan program dari Kantor Pelayanan Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah cenderung terlambat dalam memberikan edukasi dibanding dengan wilayah lain. Dengan demikian, hasil evaluasi pendidikan inklusi kesadaran pajak di Jawa Tengah masih jauh dari visi misi program.

DAFTAR PUSTAKA

Liputan 6, L. (2019). Kemenkeu Prediksi Penerimaan PAjak 2019 Tak Capai Target. Retrieved from Liputan 6 website:
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4014337/kemenkeu-prediksi-penerimaan-pajak-2019-tak-capai-target>

Direktorat Jendera Pembelajaran dan Kemahasiswaan, K. R. T. dan P. T. (2017). *Panduan Pembelajaran Kesadaran Pajak untuk Pendidikan Tinggi*.

Direktur Jenderal Pajak, R. P. (2019). *Mengenal Rasio Pajak Indonesia*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia website:
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/>.

Hastuti, R. (2014). Tax awareness and tax education: a perception of potential taxpayers. *International Journal of Economics and Law*, 5(1).
<https://doi.org/ISSN 2289-1552>

Indonesia, K. K. R. (2018). *Membangun Kesadaran Pajak Melalui Pendidikan*. Retrieved from
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/membangun-kesadaran-pajak-melalui-pendidikan/>.

Jayate, R. P. S. E. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Lovihan, S. (2014). *Pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak wajib orang pribadi di kota Tomohon*.

Nurlis, W. dan. (2010). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga), Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto*.

Pajak, T. E. P. D. J. (2016). *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.